

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mengubah cara kerja aparaturnya pemerintah, termasuk aparaturnya desa. Kompetensi digital ini menjadi salah satu prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi digital didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas (Listiaji & Subhan, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi digital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai, termasuk dalam meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas hasil kerja (Rohmah, 2020).

Sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola keuangan daerah, pemerintah Indonesia mengamanatkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD berfungsi untuk mendukung integrasi perencanaan, penganggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan data pembangunan daerah. Penelitian (Naida, 2024) menemukan bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya dari (Irfan et al., 2023) menunjukkan bahwa an teknologi informasi dan kompetensi pegawai secara signifikan aruhi kinerja pegawai negeri sipil, terutama dalam pengelolaan rasi dan layanan desa. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa



penggunaan teknologi bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen krusial untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur desa.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi lebih menitikberatkan pada kompetensi pegawai atau penerapan teknologi secara umum tanpa meneliti secara spesifik peran mediasi penggunaan SIPD pada hubungan antara kompetensi digital dan kinerja pegawai pengelola keuangan desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan umumnya berada di level pemerintah kota atau OPD, bukan pada konteks aparatur desa yang mengelola keuangan di tingkat desa.

Research gap ini penting karena pengelolaan keuangan desa memiliki kompleksitas tersendiri. Menurut (Saragih et al., 2024), rendahnya kapasitas SDM dan lemahnya pemanfaatan sistem informasi menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, studi tentang pengaruh kompetensi digital terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan desa dengan penggunaan SIPD sebagai mediator di Kabupaten Luwu Timur menjadi relevan.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat pengelolaan dana desa berperan vital dalam penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi, 2023). Tanpa kompetensi digital yang memadai, penggunaan SIPD tidak akan optimal,

sehingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat terganggu. Sebaliknya, penerapan SIPD yang baik tanpa kompetensi digital



pegawai yang memadai juga tidak akan menghasilkan kinerja yang maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah kompetensi digital berpengaruh terhadap penggunaan SIPD di Kabupaten Luwu Timur?
- 2) Apakah kompetensi digital berpengaruh terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur?
- 3) Apakah penggunaan SIPD berpengaruh terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur?
- 4) Apakah kompetensi digital berpengaruh terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur jika dimediasi penggunaan SIPD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh kompetensi digital terhadap penggunaan SIPD di Kabupaten Luwu Timur
- 2) Menganalisis pengaruh kompetensi digital terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur
- 3) Menganalisis pengaruh penggunaan SIPD terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur



- 4) Menganalisis pengaruh kompetensi digital terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur jika dimediasi penggunaan SIPD

1.4 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen publik dan sistem informasi pemerintahan, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai penerimaan dan pemanfaatan teknologi di sektor publik. Penelitian ini memperluas penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) pada konteks pengelolaan keuangan desa, dengan menambahkan variabel kompetensi digital sebagai faktor penting yang memengaruhi perilaku penggunaan sistem informasi (SIPD). Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan empiris bagi pengembangan teori terkait hubungan antara kompetensi digital, pemanfaatan teknologi informasi, dan kinerja pegawai sektor publik. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik dalam penelitian selanjutnya yang membahas digitalisasi administrasi pemerintahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis teknologi.

1.5 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam meng kebijakan peningkatan kompetensi digital aparatur desa, pelatihan, bimbingan teknis, atau sertifikasi digital untuk



mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bagi pegawai pengelola keuangan desa, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya menguasai keterampilan digital agar mampu memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun strategi transformasi digital di sektor pemerintahan desa guna memperkuat tata kelola keuangan publik berbasis teknologi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Grand Theory*

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi publik mengelola sumber daya dan layanan publik, termasuk dalam tata kelola keuangan desa. Untuk menjelaskan hubungan antara kompetensi digital, penggunaan sistem informasi, dan kinerja pegawai, teori yang paling relevan adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis, 1985). TAM menjelaskan bahwa penerimaan individu terhadap teknologi ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (PU) atau persepsi terhadap manfaat teknologi, dan *perceived ease of use* (PEOU) atau persepsi terhadap kemudahan penggunaan. Kedua faktor ini memengaruhi sikap seseorang terhadap penggunaan teknologi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perilaku aktual dalam menggunakan sistem tersebut.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kompetensi digital berperan penting dalam menentukan sejauh mana pegawai mampu memahami, mengoperasikan, dan memanfaatkan sistem berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurut (Venkatesh, 2000), pengguna dengan tingkat kompetensi digital yang lebih tinggi akan memiliki persepsi positif terhadap kemudahan dan manfaat sehingga meningkatkan tingkat penerimaan dan penggunaan i. Dengan demikian, kompetensi digital dapat dipandang sebagai wal yang memengaruhi *behavioral intention to use* dan *actual*



system use dalam kerangka TAM. Lebih lanjut, penggunaan SIPD sebagai sistem informasi publik menjadi variabel penting yang memediasi hubungan antara kompetensi digital dan kinerja pegawai. Sistem informasi yang dianggap mudah digunakan dan bermanfaat akan lebih sering dimanfaatkan oleh pengguna, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja. Dalam konteks pemerintahan desa, penggunaan SIPD memungkinkan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan terintegrasi, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai pengelola keuangan desa.

Teori TAM juga menjelaskan bahwa perilaku penggunaan teknologi tidak hanya bergantung pada faktor teknis, tetapi juga pada persepsi, pengalaman, dan kompetensi pengguna. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan digital menjadi prasyarat penting bagi pegawai untuk dapat memanfaatkan SIPD secara optimal. Kompetensi digital yang baik membantu pegawai dalam memahami antarmuka sistem, meminimalkan kesalahan input data, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis informasi yang dihasilkan oleh sistem.

Berdasarkan uraian tersebut, *Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan pengaruh kompetensi digital terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan desa dengan penggunaan SIPD sebagai variabel mediasi. Kompetensi digital

akan persepsi kemudahan dan kemanfaatan terhadap SIPD, yang n mendorong peningkatan frekuensi dan kualitas penggunaan



sistem. Penggunaan SIPD yang efektif selanjutnya akan meningkatkan kinerja pegawai, khususnya dalam aspek efisiensi, akurasi laporan, dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian, TAM memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami mekanisme hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.2. *Applied Theory*

2.2.1 Kompetensi Digital

Kompetensi digital ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang tentang menggunakan, mengakses, membuat, dan berbagi sumber daya digital secara efektif maupun efisien, serta untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan teknologi digital untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan aplikasi secara efektif untuk memperoleh, menganalisis, memproduksi, serta mengelola informasi dalam konteks yang relevan. Kompetensi ini menjadi penting dalam era digital untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi (Marguna, 2020).

Kompetensi digital sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan baik, meliputi keterampilan teknis, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman dalam konteks sosial terkait penggunaan teknologi (Mayes dan Folwer, 2013).

(Van Deursen & Van Dijk, 2014) mengemukakan bahwa kompetensi digital



kemampuan operasional, formal, informasi, dan strategis dalam nakan teknologi digital. (Giroth et al., 2024) menjelaskan

kompetensi digital sebagai kemampuan multidimensional yang mencakup literasi informasi, keterampilan teknis, serta kemampuan menggunakan alat digital untuk kolaborasi dan komunikasi.

Kompetensi digital bagi pengelola keuangan desa sangat penting karena berkaitan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Berikut penjelasannya dalam beberapa aspek:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan kompetensi digital, pengelola keuangan desa dapat menggunakan aplikasi keuangan desa (misalnya Siskeudes) untuk mencatat, melaporkan, dan mempublikasikan penggunaan dana desa secara jelas. Data yang terdokumentasi secara digital memudahkan proses audit oleh inspektorat, BPK, maupun masyarakat. Transparansi ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Digitalisasi memungkinkan otomatisasi pencatatan, perhitungan, dan pelaporan sehingga mengurangi risiko kesalahan manual. Pengelolaan berbasis aplikasi mempercepat proses penyusunan anggaran, realisasi, dan laporan pertanggungjawaban. Efisiensi ini berdampak pada penghematan waktu dan tenaga perangkat desa.

3. Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa

Kompetensi digital membantu aparat desa memahami jejak digital (digital

sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dengan mudah. Hal ini minimalkan potensi korupsi, manipulasi data, atau penggelapan dana.



Sistem digital yang terintegrasi juga memungkinkan pengawasan real-time oleh pemerintah pusat maupun daerah.

4. Keterhubungan dengan Layanan Pemerintah Lain

Banyak layanan keuangan desa kini terintegrasi dengan sistem perbankan, perpajakan, dan aplikasi pemerintah pusat. Pengelola keuangan desa yang melek digital dapat dengan mudah melakukan transfer dana, pembayaran pajak, dan sinkronisasi data dengan instansi terkait. Hal ini memperkuat konektivitas desa dengan ekosistem digital nasional.

5. Peningkatan Kapasitas dan *Profesionalisme*

Kompetensi digital membuat aparat desa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Desa yang dikelola dengan baik secara digital akan lebih mudah dalam mengakses bantuan, hibah, maupun program pembangunan lain. Aparat yang melek digital juga mampu beradaptasi dengan inovasi teknologi baru, misalnya penggunaan tanda tangan elektronik, blockchain untuk transparansi dana, atau dashboard monitoring keuangan.

Indikator kompetensi digital menurut Baharrudin et al (2021) sebagai berikut:

- 1) Mengelola dan menyimpan data dan konten digital
- 2) Berbagi informasi melalui teknologi digital
- 3) Melindungi data instansi dan privasi



gidentifikasi kebutuhan dan solusi teknologi yang tepat.

2.2.2 Kinerja Pegawai Pengelolaan Keuangan Daerah

Seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah ialah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam tahapan pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 Pasal 163 menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja. Selanjutnya pada pasal 164 ayat (2) dinyatakan bahwa pergeseran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. Pada pasal 164 ayat (5) dinyatakan bahwa perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran. Di samping itu atas instruksi dari pemerintah pusat seperti halnya penanganan Covid-19 pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran.

Menurut (Darbianda, 2018), pemerintah daerah wajib melakukan proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pemberitahuan serta

lisaan data keuangan suatu entitas dengan teratur, transparan dan
al sebagai bagian dari aktivitas akuntansi keuangan dan laporan



keuangan daerah terkait penggunaan APBD. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tiap akhir tahun anggaran kepala daerah wajib melaporkan laporan penggunaan keuangan daerah kepada DPRD.

Kinerja pegawai juga didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam konteks pengelola keuangan daerah, kinerja mencakup efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan (Manoe et al., 2023). Dalam upaya mengukur kinerja organisasi dan mengukur kinerja perorangan sebagai pelaku dalam organisasi. Standar ukuran kinerja suatu organisasi harus diproyeksikan ke dalam standar kinerja para pelaku dalam unit-unit yang bersangkutan. Setelah seluruh standar kinerja tersebut ditentukan yang selanjutnya digunakan untuk dibandingkan dengan kinerja yang sebenarnya (*actual performance*). Evaluasi atas kinerja harus dilakukan terus menerus agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Standar kerja dapat dibandingkan dengan apa yang diharapkan dilakukan seseorang dengan apa yang sesungguhnya dikerjakan, seorang supervisor dapat menentukan level kinerja pegawai (Ruspratiwi et al., 2024). Proses penilaian kinerja harus dikaitkan dengan uraian pekerjaan dan standar kerja. Mengembangkan standar kinerja yang jelas dan realistis dapat mengurangi problem komunikasi dalam umpan balik penilaian kinerja antara manajer, supervisor, dan karyawan.



Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2010) menjelaskan bahwa ada dua factor yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu :

(1) Faktor Kemampuan (*Ability*)

Secara umum kemampuan (*Ability*) ini terbagi menjadi 2 yaitu kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan realitas (*knowledge*) dan (*skill*).

(2) Faktor Motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan suatu sikap (*Attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasi. Situasi yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pemimpin, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

Menurut Mangkunegara, indikator kinerja karyawan meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, kehandalan, dan sikap. Kualitas kerja mengacu pada ketelitian dan ketepatan dalam mengerjakan tugas. Kuantitas kerja mengukur jumlah volume atau kecepatan pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu tertentu. Kehandalan mencerminkan kemampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan tingkat ketelitian. Sikap mencakup bagaimana karyawan menghadapi tugas, kerja sama, dan interaksi dengan orang lain.

Berikut penjelasan lebih lanjut dari indikator kinerja karyawan menurut Mangkunegara dan Prabu (2017) :

1. Kualitas Kerja (*Quality of Work*)

Ukuran seberapa baik dan akurat seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan. Dilihat dari ketelitian, kerapian, dan ketepatan dalam bekerja sesuai standar mutu yang ditetapkan.



2. Kuantitas Kerja (*Quantity of Work*)

Berkaitan dengan jumlah volume atau kecepatan kerja yang dapat diselesaikan atau dihasilkan oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu.

3. Kehandalan (*Reliability*)

Mencerminkan kemampuan karyawan untuk menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Dapat juga diartikan sebagai seberapa dapat diandalkannya seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

4. Sikap (*Attitude*)

Mencakup sikap karyawan dalam menghadapi tugas yang diberikan. Meliputi tingkat kerja sama dengan karyawan lain serta sikap terhadap atasan dan orang lain.

2.2.3 Pemanfaatan SIPD RI

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan platform yang dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi pemerintahan daerah secara terintegrasi dan berbasis teknologi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintahan daerah, termasuk informasi pembangunan, keuangan, serta administrasi lainnya. SIPD RI diimplementasikan sesuai dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019, yang menggantikan regulasi

nya, untuk mendukung kebijakan *One Data Indonesia* yang menyatukan dan menyinkronkan data dari seluruh daerah guna



menunjang perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan secara nasional. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

(Sudianing & Seputra, 2019) menyebutkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mempermudah penyusunan informasi pembangunan daerah, termasuk data keuangan dan administrasi pemerintah. (Febriyanti & Andi, 2024) mendefinisikan SIKD sebagai alat untuk mendokumentasikan data keuangan daerah secara efisien, meningkatkan akurasi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Adapun (Septiani & Isnawaty, 2024) menekankan pentingnya penerapan sistem ini untuk mendukung akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SIPD RI memanfaatkan teknologi berbasis web untuk memudahkan akses dan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Aplikasi ini menyediakan data regional secara real-time untuk keperluan perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi program. Implementasi SIPD RI telah menunjukkan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi keuangan, namun pada tahap awal pelaksanaannya, ditemukan sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesiapan SDM, kendala teknis dalam integrasi data, dan hambatan jaringan internet. Masalah seperti kesulitan memasukkan data secara online dan



a pelatihan untuk operator SIPD RI menjadi kendala yang jaruhi kelancaran operasional sistem.

Dari segi efektivitas, SIPD RI dapat membantu pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan kerja secara lebih cepat dan akurat, termasuk pengelolaan anggaran berbasis data. Namun, penerapan sistem ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk melatih staf yang kompeten agar dapat memahami dan mengelola aplikasi dengan optimal. Studi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD RI secara signifikan dipengaruhi oleh pelatihan dan bantuan teknis, terutama dalam hal peningkatan kualitas pegawai pemerintah daerah (Tumija & Erlambang, 2023).

Meskipun demikian, keberhasilan SIPD RI tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga faktor-faktor seperti kepemimpinan, motivasi, dan kerja sama antar-instansi. Studi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD RI bergantung pada dukungan politik, komitmen manajerial, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dengan menyelesaikan berbagai kendala yang ada, SIPD RI memiliki potensi besar untuk menjadi landasan transformasi digital dalam pemerintahan daerah di Indonesia, sejalan dengan visi pembangunan berbasis teknologi dan data yang terintegrasi.

Menurut (Maulani et al., 2024) indikator keberhasilan implementasi SIPD RI mencakup:

- 1) Kemudahan Penggunaan (*Ease of Use*): Seberapa mudah pengguna mengoperasikan sistem



urutan dan Kelengkapan Informasi: Data yang disajikan sistem s mutakhir dan valid

- 3) Komitmen Organisasi : Dukungan dari pihak manajemen dalam memfasilitasi implementasi sistem
- 4) Keamanan dan Kerahasiaan Data: Perlindungan terhadap akses dan penggunaan data.

Berikut Indikator Penggunaan SIMDA menurut (Handayani, 2019) yang dalam penelitian ini merupakan SIPD sebagai berikut:

1. Akurasi Data: Indikator utama adalah kemampuan SIPD untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Ini mencakup memastikan bahwa data aset dan keuangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Kelengkapan Fitur: Sejauh mana SIPD menyediakan fitur yang mendukung berbagai elemen pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.
3. Keamanan Data: Indikator ini menunjukkan seberapa aman data SIPD dari akses ilegal, yang mencakup penerapan enkripsi data dan audit keamanan berkala.
4. Kemudahan Penggunaan: Ini terkait dengan antarmuka pengguna SIPD dan kemudahan interaksi pengguna dengan sistem. Ini mencakup dukungan teknis, dokumentasi, dan instruksi yang jelas.
5. Integrasi dengan Sistem Lain: SIPD memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem informasi lainnya, baik di dalam maupun di luar organisasi pemerintah daerah, yang membuat pertukaran data dan

asi lebih mudah.



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	(Zulfikar & Aripin, 2023)	<i>Influence of Competence and Application Local Government Information System (SIPD) Encouraging the Quality of Financial Management</i>	Kompetensi dan aplikasi SIPD secara positif memengaruhi kualitas manajemen keuangan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2	(Bernika et al., 2023)	<i>Implementation and Implications of Regional Government Information System (SIPD) on Expenditure Administration</i>	SIPD di Manado membantu pengelolaan informasi keuangan namun menghadapi kendala seperti integrasi sistem dan pemahaman SDM yang minim.
3	(Hasanah et al., 2024)	<i>UTAUT Model Mediated by Government Information System to the Intention to Use of Indonesian Local Government</i>	Ekspektasi kinerja, usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung berpengaruh terhadap niat menggunakan SIPD melalui mediasi sistem informasi pemerintah.



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
4	(Farozji et al., 2022)	Pengaruh pelatihan kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan kspps tam kediri	Pelatihan dan lingkungan kerja memengaruhi kinerja pegawai, sedangkan motivasi tidak berpengaruh signifikan.
5	Yunita, Noor, & Suherman, (2023)	<i>The Effect of the Implementation of Regional Financial Management Information System (SIMDA) and Human Resource Competence on the Quality of Financial Reports (Case Study On Regional Work Units In Sukabumi Regency)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.
6	Basri & Rofika, (2021)	Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengaruh SAKD, SIMDA, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini menyimpulkan: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi manajemen keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
7	Hapsari, (2023)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan	Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berkontribusi pada sistem informasi manajemen wilayah. Dukungan manajemen puncak berkontribusi pada sistem informasi manajemen area. Kompetensi sumber daya manusia berkontribusi pada kualitas laporan keuangan.
8	Istiqamah & Abdullah, (2023)	<i>The Influence of Apparatus Competency, The Role of Government Internal Supervisory Apparatus, and The Effectiveness of The Government's Intern Control System on The Performance of The Aceh Government's Regional Financial Management</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, peran aparatur pengawas internal pemerintah dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan daerah Pemerintah Aceh.
9	Wahyuni, Suteja, & Sitiari, (2021)	<i>Competence and Work Environment Influences on Employees' Motivation and Performance at Regional Financial and Asset Management Agency of</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi karyawan dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi karyawan dan lingkungan kerja serta motivasi



No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
		<i>the Regency of Karangasem</i>	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Itu adalah motivasi yang berfungsi sebagai mediasi sempurna dari pengaruh kompetensi terhadap kinerja, sedangkan motivasi berfungsi sebagai mediasi parsial antara pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
10	Kustono, Dahani, Nanggala, & Effendi, (2021)	<i>Antecedents For Improving Acceptance Of Management Information Systems: Learning From Regional Governments In Indonesia</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga hipotesis ditolak, dan lima hipotesis diterima. Karyawan yang memiliki efikasi diri dalam menggunakan aplikasi mendapat manfaat dari penggunaan SIMDA dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri adalah variabel eksogen awal utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi baru.

